

MASALAH KAMBOJA: POSISI VIETNAM DAN TANGGAPAN ASEAN

Asnani USMAN*

Dalam tahun 1983 terjadi perkembangan-perkembangan baru yang menyangkut penyelesaian politik masalah Kamboja, yaitu: penarikan mundur 15.000 pasukan Vietnam dari Kamboja tanggal 2 Mei 1983; kesediaan Muangthai untuk berkunjung ke Hanoi dengan persyaratan "usul 30 km;" dan ditetuskannya gagasan Sihanouk mengenai Pemerintahan Koalisi Rekonsiliasi. Perkembangan-perkembangan ini sebelumnya diharapkan dapat menjadi pembuka jalan kemacetan yang berlarut-larut selama ini.

Tetapi penolakan Vietnam terhadap "usul 30 km" sebagai pra-kondisi kunjungan Muangthai ke Hanoi menyebabkan harapan itu tidak terpenuhi. Demikian pula gagasan Sihanouk telah ditolak Vietnam. Tampaknya sikap keras Vietnam ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ASEAN menegaskan kembali sikapnya yang tetap berpegang kepada Deklarasi Konferensi Internasional mengenai Kamboja (Deklarasi ICK) dalam Komunike Bersama Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN ke-16 pada tanggal 24-25 Juni 1983 di Bangkok.

Walaupun demikian dalam komunike tersebut, ASEAN menunjukkan sikap luwesnya dengan menyatakan bahwa ASEAN bersedia mengadakan "konsultasi-konsultasi konstruktif" dengan Vietnam untuk menuju kepada suatu konferensi internasional. Untuk pertama kalinya ASEAN mengemukakan konferensi internasional di luar konteks ICK. Demikian pula ajakan ASEAN terhadap Vietnam untuk mempertimbangkan "unsur-unsur" Deklarasi ICK dalam mencari penyelesaian masalah Kamboja mencerminkan sikap luwes ASEAN.

Sejauh mana Vietnam menanggapi sikap luwes ASEAN masih sulit untuk diramalkan mengingat sikap kerasnya selama ini yang juga tercermin dalam usul-usul yang diajukan kepada ASEAN. Selama ini strategi ASEAN dan posisi Vietnam yang saling bertolak belakang telah menghambat tercapainya kompromi yang dapat diterima kedua pihak. Selain itu masalah-masalah lain, seperti masalah keamanan Muangthai, permusuhan Cina-Vietnam dan persaingan Cina-Uni Soviet makin menambah sulit tercapainya kompromi itu. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan satu sama lain yang membuat penyelesaian Kamboja mengalami jalan buntu hingga kini.

STRATEGI ASEAN DAN POSISI VIETNAM

Strategi ASEAN dalam mencari penyelesaian masalah Kamboja adalah dengan mengajukan resolusi-resolusi dalam Sidang Majelis Umum PBB yang telah diterima, yaitu: Resolusi No. 34/22/1979, Resolusi No. 35/6/1980 (resolusi Konperensi Internasional mengenai Kamboja) dan Resolusi No. 36/5/1981. Deklarasi ICK merupakan hasil konperensi itu yang diadakan tanggal 13-17 Juli 1983 dan menyebutkan prinsip-prinsip penyelesaian Kamboja, antara lain penarikan mundur pasukan Vietnam, penentuan nasib rakyat Kamboja tanpa turut campur tangan luar, dan Pemilu yang bebas di bawah pengawasan PBB.

Selain itu, sebagai instrumen diplomatik bagi dilaksanakannya Deklarasi ICK, ASEAN telah mendukung dibentuknya Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja (PKDK) pada tanggal 7 Juli 1982. Pembentukan Pemerintahan Koalisi ini penting dilakukan untuk mendapat dukungan internasional dalam Sidang MU-PBB, sehingga kursi Kamboja dapat dipertahankan hingga kini. Tujuan pemerintahan ini adalah mengadakan tekanan-tekanan diplomatik lebih lanjut terhadap Vietnam agar negara ini menerima kompromi menurut prinsip-prinsip Deklarasi ICK.

Sebaliknya Vietnam tetap bertahan pada posisinya, yaitu dengan tetap mempertahankan 150.000 pasukannya di Kamboja untuk mendukung pemerintahan Heng Samrin dalam usaha menyapu bersih kelompok-kelompok perlawanan anti-Vietnam, terutama Khmer Merah, di perbatasan Muangthai-Kamboja. Dengan dukungan militer Vietnam, pemerintahan Heng Samrin berusaha melancarkan roda pemerintahan dalam negeri Kamboja. Sejauh ini tampaknya usaha Heng Samrin berhasil, karena rakyat menerima pemerintahan ini, walaupun didukung Vietnam. Bagi rakyat Kamboja mungkin siapa pun yang memerintah tidak terlalu dipersoalkan, asal Pol Pot tidak kembali.

Posisi Vietnam diperkuat dengan usaha-usaha pada tingkat diplomatik yang bertujuan menyingkirkan PKDK sebagai wakil Kamboja di forum-forum internasional, yaitu di PBB dan KTT Non-Blok. Sejauh ini Vietnam berhasil mengosongkan kursi Kamboja dalam KTT Non-Blok. Terhadap PBB, Vietnam selalu menolak keterlibatan lembaga ini selama masih mengakui PKDK sebagai wakil Kamboja. Vietnam bersedia menerima peranan PBB kalau lembaga ini sudah menarik pengakuannya terhadap PKDK.

Usaha-usaha pada tingkat diplomatik ini didukung dengan serbuan-serbuan musim keringnya di perbatasan Muangthai-Kamboja yang diadakan pada tiap musim kering tahun 1979/1980, 1980/1981 dan 1981/1982 (Desember-Maret). Dalam serangan musim kering terakhir tahun 1982/1983, pasukan Vietnam memusatkan perhatiannya pada penghancuran tentara KPNLF (pimpinan Son Sann) dan Moulinaka (pimpinan Sihanouk). Kedua kelompok ini berhasil didesak mundur. Pada tanggal 31 Maret 1983, pertahanan Khmer Merah di Phnom Penh Chat diserang secara besar-besaran oleh Vietnam.¹

Dari segi ekonomi, tampak jelas strategi ASEAN dan posisi Vietnam terhadap masalah Kamboja. ASEAN telah menyerukan isolasi ekonomi terhadap Vietnam kepada beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat. ASEAN mengharapkan tekanan-tekanan ekonomi ini dapat melemahkan Vietnam, sehingga ia bersedia memenuhi tuntutan ASEAN untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja. Tetapi tampaknya Vietnam tetap bertahan pada posisinya betapa pun parah ekonominya.

USUL-USUL VIETNAM DAN TANGGAPAN ASEAN

Di samping strategi ASEAN dan posisi Vietnam yang saling bertentangan, usul-usul yang diajukan Vietnam kepada ASEAN mengenai masalah Kamboja pun tidak mendapat tanggapan positif ASEAN. Usul-usul ini dimuat dalam Komunike-komunike Bersama Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina yang diadakan dua kali setahun.² Dalam setiap komunike dinyatakan penegasan Vietnam yang sangat prinsipial, yaitu: Kamboja tidak bisa diubah lagi dan kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja karena adanya "ancaman Cina." Tetapi penegasan ini disertai usul-usul yang tampaknya mencerminkan perubahan sikap Vietnam.

Dalam Komunike Bersama Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina I (5 Januari 1980) di Phnom Penh dikemukakan dua usul, yaitu: (1) Ketiga ne-

¹ Juwono Sudarsono, "Kamboja: Diplomasi Lawan Medan Laga," *Kompas*, 4 April 1983.

² *Conferences of Foreign Ministers of Vietnam, Laos, and Kampuchea (1980-1981)* (Information and Press Department Ministry of Foreign Affairs Socialist Republic of Vietnam, 1982).

gara ingin mengadakan Perjanjian Kerja Sama dan Persahabatan dengan negara-negara Asia Tenggara; (2) Ketiga negara siap untuk mendiskusikan dan menandatangani Perjanjian Non-agresi Bilateral dengan negara-negara ASEAN dan Birma, dan diskusi untuk menetapkan kawasan Asia Tenggara yang damai, merdeka, bebas dan netral. Usul-usul ini selalu ditegaskan kembali dalam setiap komunike.

Usul-usul yang bersifat khusus dimuat dalam Komunike Bersama Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina II (17-18 Juli 1980) di Vientiane, yaitu: (1) menetapkan pembentukan "daerah bebas militer" di perbatasan Muangthai-Kamboja; (2) Muangthai dan Kamboja akan bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi masalah pengungsi; (3) siap untuk mendiskusikan bantuan kemanusiaan dengan organisasi internasional; (4) perundingan dilakukan secara langsung antara pemerintah atau non-pemerintah atau secara tidak langsung melalui negara perantara. Usul 4 pasal ini diajukan sehubungan dengan terjadinya "repatriasi sukarela" para pengungsi yang diadakan Muangthai tanggal 23 Juni 1980.

Baik 2 usul maupun 4 usul di atas tidak satu pun yang menyangkut langsung penyelesaian masalah Kamboja. Dua usul pertama bersifat luas dan hanya ingin membicarakan kawasan Asia-Tenggara tanpa menyinggung masalah Kamboja. Bagi ASEAN, masalah Kamboja harus diselesaikan lebih dahulu sebelum kawasan Asia Tenggara dibicarakan secara menyeluruh. Sebaliknya 4 usul bertujuan sangat terbatas, hanya menyangkut pengaturan situasi perbatasan Muangthai-Kamboja. Dengan usul-usul ini, Vietnam menginginkan Muangthai tidak membiarkan wilayahnya sebagai jalur suplai bantuan Cina kepada Khmer Merah. Tindakan ini telah merintangai Vietnam untuk menguasai wilayah Kamboja secara menyeluruh. Muangthai menolak usul-usul ini karena tidak merasa sebagai pihak yang bersengketa.

Pada tahun 1981, usul-usul yang diajukan baik dalam Komunike Bersama Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina III (27-28 Juni 1981) di Ho Chi Minh maupun Komunike Bersama Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina IV (13 Juni 1981) di Phnom Penh pada hakikatnya tidak berbeda. Usul-usul yang diajukan, yaitu: (1) Konperensi Regional antara ASEAN-Indocina untuk membicarakan suatu perjanjian perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara; (2) Konperensi Internasional diadakan dengan tujuan menjamin perjanjian tersebut. Dalam komunike berikutnya ditambahkan usul mengenai Konsultasi Regional yang berlanjut di antara mereka jika ASEAN belum siap mengadakan Konperensi Regional. Usul-usul di atas ini muncul sehubungan dengan diterimanya resolusi Konperensi Internasional mengenai Kamboja (September 1980).

Usul-usul itu ditolak ASEAN karena ASEAN berpendirian bahwa masalah Kamboja adalah masalah internasional, bukan saja karena adanya keterlibatan negara-negara besar, tetapi juga karena penyerangan Vietnam terhadap negara itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu ASEAN berpendapat bahwa penyelesaian masalah Kamboja harus melalui konperensi internasional. Selain itu diterimanya Konperensi Regional oleh ASEAN akan memberi keabsahan kepada Heng Samrin.

Situasi perbatasan Muangthai-Kamboja telah menjadi topik dalam usul-usul yang dimuat komunike-komunike selanjutnya yang dihasilkan Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina V (16-17 Pebruari 1982) di Vientiane dan Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina VI (6-7 Juli 1982 di Ho Chi Minh. Komunike pertama mengajukan usul, yaitu: (1) Ketiga negara bersedia mengkaji usul yang bertujuan memantapkan keadaan di sepanjang perbatasan Muangthai-Kamboja; (2) Ketiga negara bisa mendiskusikan dengan Muangthai semua masalah yang menyangkut kepentingan bersama secara langsung atau tidak langsung, bilateral atau multilateral tanpa mengandung unsur pengakuan *de facto* atau *de jure* atas rezim Heng Samrin. Pada hasil hubungan semacam ini tergantung kesediaan Vietnam menarik mundur sebagian pasukannya.

Dua usul dalam komunike selanjutnya ialah: (1) dibentuknya "zona keamanan" jika Muangthai tidak siap dengan usul "daerah bebas militer;" (2) diadakan Konperensi Internasional yang diikuti ASEAN, Indocina, 5 anggota negara PBB, Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, Perancis, dan Inggris (negara-negara ini menjadi peserta dalam Konperensi Internasional mengenai Indocina tahun 1954-1961, 1962 dan 1973), kemudian Birma dan India, serta Sekretaris Jenderal PBB pribadi. Dalam komunike ini diputuskan untuk menarik mundur sebagian pasukan Vietnam dalam bulan Juli 1982. Dinyatakan-nya keputusan ini erat kaitannya dengan pembentukan Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja.

Semua usul di atas ini ditolak Muangthai yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan dengan usul-usul Vietnam itu, hanya permainan kata-kata saja. Menurut Muangthai pasukan Vietnam di Kamboja sudah menjadi masalah internasional yang perlu diselesaikan pada tingkat PBB. Keputusan penarikan mundur sebagian pasukan Vietnam dari Kamboja tidak ditanggapi positif oleh Muangthai (ASEAN) karena dianggap hanya sebagai penggantian pasukan saja.

Dari usul-usul yang diajukan Vietnam dan ditolak ASEAN jelas terlihat tujuan Vietnam untuk melenyapkan "ancaman Cina" (dalam hal ini Khmer

Pemerintah Heng Samrin di lain pihak. Dalam mencapai tujuan ini, Vietnam menganggap sikap Muangthai yang membiarkan wilayahnya digunakan Cina membantu Khmer Merah sebagai penghambat utama. Sebaliknya bagi Muangthai, invasi Vietnam ke Kamboja telah menimbulkan persoalan yang menyangkut keamanannya sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Kamboja.

MASALAH KEAMANAN MUANGTHAI

Konflik di Kamboja telah mempersulit posisi Muangthai dalam hubungannya tidak saja dengan Cina dan Vietnam, tetapi juga dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kondisi geografis yang berbatasan dengan Kamboja di sebelah timur dan dengan Cina di sebelah utara menyebabkan Muangthai mengkhawatirkan adanya ancaman terhadap keamanannya baik dari Vietnam maupun Cina.

Muangthai yang mempunyai sentimen permusuhan warisan sejarah kini merasa khawatir atas penguasaan Kamboja oleh Vietnam yang didukung oleh Uni Soviet. Kehadiran militer Vietnam di Kamboja merupakan ancaman nyata bagi Muangthai karena tekanan-tekanan militer Vietnam di perbatasannya dalam usaha menghancurkan Khmer Merah. Selain itu timbul kekhawatiran Muangthai terhadap tujuan-tujuan Vietnam di masa mendatang yang berkaitan dengan perebutan 16 propinsi di timur laut Muangthai.

Kekhawatiran Muangthai terhadap Cina disebabkan oleh bantuan Cina kepada Partai Komunis Muangthai (CPT). Sikap Muangthai yang membiarkan wilayahnya digunakan Cina untuk suplai senjatanya ke Khmer Merah telah menyebabkan Cina bersikap lunak dalam dukungannya kepada CPT. Dukungan ini merupakan ancaman terhadap keamanan Muangthai. Salah satu sumber dari Muangthai yang mempunyai hubungan dekat dengan para militer negara ini mengemukakan bahwa jika mereka menghentikan (menutup) jalur suplai Khmer Merah, Cina akan meningkatkan dukungannya terhadap CPT. Kebijakan yang ditempuh Muangthai sejak tahun 1979 ini tampaknya sulit untuk berbalik lagi tanpa menimbulkan akibat-akibat yang serius bagi hubungannya dengan Cina.¹

Tindakan Muangthai untuk membina hubungan baik dengan Cina tampaknya telah melemahkan kegiatan CPT di dalam negeri ini, bahkan secara berangsur-angsur terjadi penyerahan-penyerahan anggotanya kepada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kepala Dewan Keamanan Na-

¹Gareth Porter, "ASEAN and Kampuchea: Shadow and Substance," *Indochina Issues*,

sional Muangthai, Prasong Soonsiri bahwa: (1) CPT pro-Beijing pada tahun 1979 berjumlah ± 14.000 orang, kini berkurang menjadi 7.000 orang; (2) CPT tidak pernah mengadakan Kongres Partai lagi setelah kongresnya ke-21 tahun 1981; (3) banyak gerilyawan menanggapi tawaran menyerah sebagai imbalan bagi jaminan kekebalan dari pemerintah.¹ Pada bulan Desember 1982, lebih dari 1.000 pemberontak di Zona 444 Propinsi Muk Daham menyerah kepada pemerintah.²

Di samping itu, terjadinya penyerahan-penyerahan didukung oleh adanya kebijaksanaan pemerintah. Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) Muangthai, Jenderal Arthit Kamlang-ek mengemukakan sebagai berikut: (1) mereka yang menyerah mempunyai hak untuk menjadi anggota Parlemen; (2) mereka akan diberi ketrampilan dan pekerjaan; (3) senjata-senjata mereka akan dibeli pemerintah.³ Pada tanggal 27 Desember 1982 terjadi penyerahan 800 orang, sehingga jumlah gerilyawan yang menyerah menjadi 1.800 orang.⁴ Jumlah ini makin meningkat menjadi 2.260 orang pada awal tahun 1983 ketika diumumkan Pengumuman Amnesti oleh pemerintah.⁵ Berhasilnya kebijaksanaan Pemerintah Muangthai itu tidak dapat dilepaskan dari pelunakan dukungan Cina terhadap CPT tersebut.

Oleh karena latar belakang keadaan di atas, usaha-usaha Muangthai dalam konflik Kamboja adalah menekan Vietnam. Muangthai merasa lebih mampu menghadapi Vietnam daripada Cina saat ini. Cina mungkin merupakan ancaman yang lebih besar dalam jangka panjang, tetapi Vietnam merupakan ancaman yang lebih mendesak. Ancaman Cina akan menjadi kenyataan jika Muangthai "mengakomodasi" Vietnam.

Strategi yang ditempuh Muangthai sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan yang disadari Muangthai mengenai kemampuan negara-negara ASEAN untuk menjamin keamanannya. Muangthai menyadari bahwa ASEAN yang sedang menghadapi masalah-masalah ekonomi dan sosial masih terlalu lemah untuk memberi dukungan yang efektif jika terjadi serangan dari luar terhadap wilayahnya. Muangthai juga menyadari bahwa invasi Vietnam ke negara ini tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu apa yang diperlukan negara ini dari ASEAN adalah dukungan yang kuat, kukuh, dan jelas bagi perlawanannya terhadap Vietnam. Dukungan semacam ini tidak saja memperkuat posisi Muangthai, tetapi juga akan memenangkan

¹Antara, 17 Agustus 1982.

²Antara, 8 Desember 1982.

³Antara, 8 Desember 1982.

⁴Kompas, 29 Desember 1982.

dukungan internasional yang akan menekan Vietnam untuk menerima penyelesaian masalah Kamboja.¹ Dengan demikian ketidakmampuan ASEAN menjamin keamanan Muangthai menyebabkan negara ini memilih mengandalkan kekuatan luar, yaitu Cina.

Tetapi kebijaksanaan Muangthai yang mengikuti strategi Cina membuat Vietnam secara berlarut-larut makin memperkuat ketergantungan Vietnam kepada Uni Soviet yang sebenarnya tidak dikehendaki ASEAN. Keadaan yang berlarut-larut ini akan menghadapkan baik ASEAN maupun Vietnam kepada realitas politik yang ada. Pihak mana yang akan makin kuat posisinya yang secara berangsur-angsur akan menarik dukungan internasional yang makin besar terhadap salah satu pihak, PKDK dukungan Cina dan ASEAN atau Heng Samrin dukungan Vietnam? Kemungkinan inilah yang tampaknya menjadi latar belakang timbulnya gagasan-gagasan baru yang diharapkan dapat menjadi pembuka jalan kemacetan penyelesaian masalah Kamboja.

GAGASAN-GAGASAN BARU

Gagasan dan peristiwa baru yang pertama kali muncul pada awal tahun ini ialah gagasan Konperensi Regional ASEAN-Indocina tanpa Heng Samrin (Lima tambah Dua) pada waktu diadakannya KTT Non-Blok ke-7 (7-12 Maret 1983) di New Delhi. Gagasan ini dicetuskan oleh Menlu Malaysia Gazhali dan mendapat tanggapan positif dari Menlu Nguyen Co Thach.² Tetapi negara-negara ASEAN lainnya tidak segera mengambil sikap tentang hal itu. Penolakan ASEAN terhadap usul itu baru dinyatakan pada Pertemuan ASEAN-MEE pada tanggal 25 Maret 1983 di Bangkok.³

Kemudian terjadi penarikan mundur 15.000 pasukan Vietnam dari Kamboja tanggal 2 Mei 1983. Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi sebelumnya, terutama sehubungan dengan KTT Non-Blok tersebut. Usaha ASEAN untuk mengajukan Sihanouk sebagai wakil Kamboja dalam konperensi itu tidak berhasil. Kursi Kamboja tetap kosong. Hal ini merupakan kemenangan Vietnam yang tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Duta Besar Vietnam Mai Van Bo di Paris pada tanggal 23 Pebruari 1983 bahwa Pertemuan Puncak Indocina telah memutuskan untuk menarik mundur seba-

¹Kramol Tongdhamachart, "Thai Perspectives on the Conflict in Kampuchea," dalam *Economic, Political, and Security Issues in Southeast Asia in the 1980s*, ed. Robert A. Scalapino dan Jusuf Wanandi (Berkeley, California: Institute of East Asian Studies, University of California, 1982), hal. 81.

²Nayan Chanda, "Glimmers of Hope," *FEER*, Vol. 121, No. 27 (7 Juli 1981), hal. 15.

³"Nhan Dan on ASEAN's Rejection of Dialogue," *Daily Report: Asia and Pacific*, FBIS (25 Maret 1983) hal. K 1.

gian pasukannya dari Kamboja karena adanya situasi mantap di Kamboja.¹ Dalam Konperensi Menlu Luar Biasa Indocina tanggal 12 April 1983 dinyatakan waktu penarikan mundur sebagian pasukan Vietnam adalah awal Mei 1983.²

Perkembangan di atas ini diikuti oleh kesediaan Muangthai untuk berkunjung ke Vietnam dengan persyaratan penarikan mundur pasukan Vietnam sejauh 30 km dari perbatasan Muangthai-Kamboja. Dalam kunjungannya ke Bangkok pada 9 Mei 1983 Co Thach mengatakan Vietnam tidak bersedia menerima gagasan Muangthai jika usul 30 km dijadikan persyaratan. Dalam Konperensi Menteri Luar Negeri ASEAN ke-16 tanggal 24-25 Juni 1983 di Bangkok, ASEAN mendukung Muangthai untuk berdialog dengan Vietnam jika usul 30 km diterima sebagai persyaratan. Hal ini yang menyebabkan kunjungan Muangthai ke Hanoi tidak (belum?) dilaksanakan.

Di samping itu Sihanouk menyatakan gagasannya mengenai Pemerintahan Koalisi Rekonsiliasi yang terdiri dari empat pihak, yaitu Heng Samrin, Sihanouk, Son Sann dan Khieu Samphan. Jika pemerintahan ini terbentuk tidak ada lagi alasan Vietnam untuk tetap di Kamboja.³ Dicetuskannya gagasan ini hampir menimbulkan perpecahan dalam tubuh PKDK. Kritikan dan ketidaksetujuan yang dinyatakan Khieu Samphan menyebabkan Sihanouk mengatakan akan mengundurkan diri dari PKDK. Gagasan ini telah ditolak Vietnam.

Dengan demikian ternyata gagasan-gagasan tersebut tidak dapat menjadi pembuka jalan penyelesaian Kamboja. Tetapi pernyataan ASEAN tentang kesediaan untuk mengadakan konsultasi konstruktif dengan Vietnam menuju suatu konperensi internasional dan ajakan ASEAN kepada Vietnam untuk mempertimbangkan unsur-unsur Deklarasi ICK menunjukkan keluwesan ASEAN yang mungkin mendapat tanggapan positif dari Vietnam.

PENUTUP

Dalam usaha mencari penyelesaian masalah Kamboja, berbagai faktor yang menjadi hambatan mungkin dapat ditembus secara bertahap dengan diadakannya pendekatan berbagai pihak. Pendekatan Muangthai-Vietnam yang belum terlaksana mungkin perlu terus diusahakan sebab pada hakikatnya keterlibatan ASEAN adalah karena faktor Muangthai.

¹*Kompas*, 25 Pebruari 1983.

²"Commentary on Dialogue Cites Thai Proposal," *Daily Report: Asia and Pacific*, FBIS (19 April 1983), hal. K. 7.

Sehubungan dengan ini, ASEAN secara bersama-sama dapat melunakkan sikap Muangthai dan meyakinkannya akan perlunya pendekatan langsung dengan Vietnam. Strategi ASEAN selama ini tidak dapat dipertahankan terus-menerus mengingat situasi yang ada yang bukan tidak mungkin makin menguntungkan posisi Vietnam. Perlu dipertimbangkan dukungan internasional terhadap PKDK dalam Sidang MU-PBB yang akan makin sulit dipertahankan tahun demi tahun, terutama jika ternyata Khmer Merah makin mendominasi pemerintahan tersebut. Bagaimanapun Khmer Merah telah mempunyai citra buruk di mata dunia internasional, bahkan di kalangan ASEAN sendiri. Selain itu perlu dikaji kembali sejauh mana tujuan utama PKDK untuk menekan Vietnam dan memaksanya ke meja perundingan dapat berhasil. Di lain pihak Vietnam tidak akan menghentikan usahanya untuk mendapat pengakuan internasional bagi Heng Samrin.

Sebaliknya Vietnam pun tidak bersikap keras seperti tercermin dalam usul-usul yang diajukannya, yaitu membicarakan terlebih dahulu kestabilan dan keamanan kawasan Asia Tenggara daripada masalah Kamboja. Melalui pendekatan pihak ketiga, seperti Australia, mungkin dapat diketahui sejauh mana Vietnam dapat menunjukkan sikap luwesnya dalam masalah Kamboja sebagai indikasi bahwa Vietnam benar-benar ingin mencari penyelesaian masalah Kamboja dan melonggarkan ketergantungannya kepada Uni Soviet. Bagaimanapun Vietnam membutuhkan bantuan ekonomi dari negara-negara Barat yang mendukung kebijaksanaan ASEAN dalam masalah Kamboja dengan mengadakan isolasi ekonomi terhadapnya. Selain itu perlu dipertimbangkan pendekatan bilateral dan informal terhadap Vietnam oleh negara-negara ASEAN untuk melunakkan sikap Vietnam, khususnya bagi pendekatan Muangthai-Vietnam yang diperlukan.

Jika pendekatan Muangthai-Vietnam dapat dirintis, maka pertemuan ASEAN-Vietnam untuk penyelesaian Kamboja yang lebih luas tampaknya tidak sulit untuk dilaksanakan mengingat selama ini gagasan yang ada tidak dapat dilaksanakan karena keberatan Muangthai, seperti Konperensi Regional ASEAN dan Indocina tanpa Heng Samrin. Keberatan Muangthai yang sebenarnya merupakan keberatan Cina.

Oleh karena itu faktor Cina merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. ASEAN perlu meyakinkan Muangthai untuk tidak saja bersikap lunak terhadap Vietnam tetapi juga untuk membantu melunakkan sikap Cina. Bagaimanapun Cina harus menyadari betapa tidak populernya Khmer Merah di bawah pimpinan Khieu Samphan di mata dunia internasional. Selain itu sikap keras Cina ini akan makin memperkuat pengaruh Uni Soviet di Vietnam

Tetapi pendekatan-pendekatan di atas tampaknya memerlukan konsesi-konsesi yang bisa diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan terutama yang menyangkut jaminan keamanan masing-masing negara. Dapatkah ASEAN menjamin keamanan Muangthai jika Muangthai mengadakan pendekatan dengan Vietnam tanpa "restu" Cina? Atau dapatkah ASEAN meyakinkan Muangthai bahwa negara ini tidak perlu mengkhawatirkan ancaman Cina melalui CPT jika masalah CPT sudah dapat diatasinya? Kemudian dapatkah Muangthai memberikan konsesi kepada Vietnam dalam usaha pendekatan kedua negara, misalnya dengan menutup jalur suplai bantuan Cina kepada Khmer Merah? Dapatkah Vietnam memberikan konsesi bagi keamanan Muangthai? Bersediakah Cina memberi jaminan kepada Vietnam untuk tidak menimbulkan ancaman terhadap negara ini jika Vietnam bersedia mencapai penyelesaian masalah Kamboja melalui unsur-unsur Deklarasi ICK? Dan sebaliknya dapatkah Vietnam meyakinkan Cina bahwa Vietnam bukan "kaki-tangan" Uni Soviet?

Jawaban dari pernyataan-pernyataan inilah yang akan menentukan apakah rintangan-rintangan yang ada dapat ditembus untuk mencapai penyelesaian politik masalah Kamboja yang dapat diterima semua pihak yang bersangkutan. Ketidakberhasilan pendekatan-pendekatan di atas akan membuat kemacetan berlarut-larut dengan segala kemungkinan akibatnya yang tidak menguntungkan pihak mana pun.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

AKSI KEPOLISIAN